

**SINAMOT DALAM ADAT MANDAILING DI KECAMATAN MEDAN
JOHOR (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM
ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Disusun Oleh:

AHMAD MUDZAKKIR AZHARI LUBIS

NIM: 13360012

PEMBIMBING

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai mahar (*sinamot*) dalam adat Mandailing yang sangat tinggi bagi seorang wanita yang akan dinikahi. Secara umum dalam masyarakat Mandailing pengetahuan tentang penentuan mahar dalam hukum Islam tidak terlalu memahami sehingga lebih mengutamakan mahar adat dari pada mahar dalam hukum Islam sehingga ketentuannya pun berbeda dengan hukum Islam. Penentuan mahar dilaksanakan pada saat *mangaririt boru* (mendatangi calon pengantin) di mana kedua belah pihak berkumpul dan juga bersama *Harajaon* (Raja), untuk menentukan dan bernegosiasi dalam penentuan mahar yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Apabila dalam penentuan mahar tidak menemukan kata sepakat, maka acara perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau bahkan batal secara adat.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Data-data penelitian didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan menggunakan analisis *kualitatif induktif* yaitu menganalisa data yang dikumpulkan oleh penyusun, kemudian diuraikan dan dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

Adapun hasil penelitian ini disimpulkan bahwa *sinamot* dalam adat Mandailing merupakan suatu pemberian bentuk atau bahkan benda yang berharga misalnya uang atau binatang ternak dan bahkan hasil pertanian yang lain sesuai permintaan pihak mempelai perempuan yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan mahar dalam hukum Islam adalah pemberian sesuatu yang bernilai dan berharga sebagai bukti tanda cinta kepada mempelai perempuan. Perbandingan mahar antara adat Mandailing dan hukum Islam dilihat dari letak persamaannya, yaitu sama-sama memiliki persyaratan dalam pemberian mahar yaitu mahar harus bernilai, bermanfaat dan barang yang dijadikan mahar merupakan barang yang pasti dan barang yang halal. Perbedaan antara mahar adat Mandailing dan hukum Islam adalah dari jumlah atau nilai maharnya yang ditentukan. Mahar dalam adat Mandailing memiliki nilai yang cukup tinggi dan ditentukan berdasarkan status sosial, status pendidikan dan status ekonomi. Sedangkan dalam hukum Islam ketentuan mahar ditentukan berdasarkan kemampuan laki-laki dan permintaan mempelai perempuan bukan apa yang diminta oleh pihak keluarga perempuan.

Keyword: pernikahan, mahar, *sinamot* adat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis

NIM : 13360012

Judul : "Sinamot Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan Medan Johor
(Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

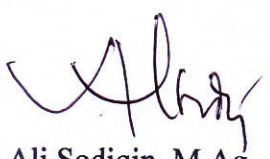
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Dzul Hijjah 1439 H
22 Agustus 2018 M

Pembimbing I

Pembimbing II,


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis

Nim : 13360012

Semester : XI

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“*SINAMOT DALAM ADAT MANDAILING DI KECAMATAN MEDAN JOHOR (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)*”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1439 H
20 Februari 2018 M



Penyusun,

Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis
NIM: 13360012

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-51/Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : SINAMOT DALAM ADAT MANDAILING DI
KECAMATAN MEDAN JOHOR (STUDI
PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM
ISLAM

Yang disiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUDZAKKIR AZHARI LUBIS

Nomor Induk Mahasiswa : 13360012

Telah diujikan pada : Kamis, 06 September 2018

Nilai ujian tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 06 September 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

KEJARLAH DUNIA MU YANG BAHAGIA

DAN

AKHIRATMU SURGA

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S Alam Nasyrah (94) : 6-7)

Halaman Persembahan

SKRIPSI ini **ZAKIR** persembahkan,

Untuk kedua Orang tua tercinta,

Adik-adik tersayang,

Atok dan Nenek dan keluarga Besar Datu' Muda Melayu Tanjung Balai

dan keluarga besar Marga LUBIS juga seluruh keluarga besar Adat

Mandailing.

Yang terakhir ini dipersembahkan kepada yang selalu menemani ku sejauh ini

mulai dari nol sampai sekarang “METY HARYANI”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta’addida
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyyā
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	I
كَسَرَ	Kasrah	Ditulis	Fa’ala
ذُكِرَ		Ditulis	A
دُمِمَ	Dammah	Ditulis	Zukira
يَذْهَبُ		Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati يَسْعَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Yas’ā
3	Kasrah + ya’ mati كَرِيم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يَيْنَكُمُ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apestrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِی الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawāial-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikannya penyusunan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “*SINAMOT* DALAM ADAT MANDAILING DI KECAMATAN MEDAN JOHOR (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun teknik penyusunan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya penyusunan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusunan

baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, izinkan penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya.
4. Dosen Penasihat Akademik Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan kepada penyusun sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, semoga mereka selalu diberikan kelimpahan rezeki dan selalu dilindungi oleh Allah.
6. Kedua Orang Tua Penyusun, Bapak Drs. H. Abidin Azhar Lubis, S.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Tun Atikah, S.Ag., M.A. yang telah melahirkan dan membesarkan penyusun, kepada abang penyusun Muhammad Adli Azhari Lubis, S.H., M.H. juga kepada ketiga adik penyusun tercinta, Abidatun Azizah Lubis, Muhammad Harmen Abdussalam Lubis dan Elvi Mawaddah Lubis serta sepupu yang penyusun sayangi Doni Tanjung, Fadhilah Tambunan, Umi Siregar. Semoga mereka akan menjadi jauh lebih baik daripada penyusun.
7. Atok dan Nenek dan keluarga besar Datu' Muda Melayu Tanjung Balai dan Bapak Abidin Azhar Lubis yang selalu memberikan semangat dan motivasi

serta mendoakan penyusun sejauh ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar.

8. Muhammad Fadhil Walid Nasution, S.E. dan Mety Haryani, S.KM. yang selalu menemani selama penyusunan skripsi ini, sekaligus orang yang selalu berbagi ilmu dan memberikan motivasi berupa arti sebuah hidup.
9. Jaka Abdillah, Jumadil, Anshory, Zufran Malau, Ginanjar, Randy Setyawan, Fadlan Rawi Harahap, Irwansyah Sagala selaku teman-teman seperjuangan dari Medan yang merantau bersama di Yogyakarta dan selalu memberikan semangat dan motivasi serta candaan yang tak pernah terlupakan selama merantau bersama, semoga kalian semua dalam keadaan sehat terus dan semoga dalam lindungan Allah.
10. Terima kasih juga kepada para narasumber telah menjadi responden penyusun dalam penelitian kali ini, semoga apa yang telah beliau-beliau berikan bermanfaat bagi diri penyusun; dan semoga beliau-beliau tersebut selalu dalam lindungan Allah.
11. Teman-teman Perbandingan Mazhab 2013 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semoga kita dapat menjadi orang yang berguna bagi Agama, dan masyarakat yang ada di sekitar kita.
12. Teman-teman KKN angkatan 90 Dusun Kunchen, Turi, Sleman, Yogyakarta, Mas Amin, Doni, Rey, Joko, Adhel, Dhiya, Dewiq, Hesti, Luthfi; semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada serta nikmat umur yang panjang yang diberikan oleh Allah.

13. Seluruh anggota pengurus UKM TAEKWONDO UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersama-sama kita mengisi hari dengan berlatih dan juga bercanda tawa bersama.
14. Teman-teman alumni MAN 1 Medan di Yogyakarta, semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dapat menyeleaikan pendidikannya tepat pada waktunya.
15. Teman-teman alumni jurusan Ilmu Agama MAN 1 Medan di Yogyakarta, terima kasih atas kenangan selama 3 tahunnya selama di sekolah dan juga kebersamaannya selama ditanah rantau Yogyakarta, sungguh kenangan yang tidak dapat dilupakan, dan semoga Allah memberikan keseuksesan kepada kita semua.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam Skripsi ini, tidak lupa pula saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan Skripsi ini sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak baik penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 05 Dzul Hijjah 1439 H
17 Agustus 2018 M

Penyusun,

Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis
NIM 13360012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
1. Manfaat teoritis	8
2. Manfaat praktis	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Sifat Penelitian	18
2. Jenis Penelitian.....	18

3. Pendekatan Penelitian	18
4. Subjek Penelitian.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
a. Dokumentasi	19
b. Analisis Data	19
6. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KETENTUAN MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar	22
B. Dasar Hukum Mahar	26
C. Macam-macam Mahar	31
D. Kadar Mahar	35
E. Gugurnya Mahar	37
F. Hikmah Disyari'atkannya Mahar	38

BAB III KETENTUAN MAHAR (*SINAMOT*) DALAM ADAT MANDAILING

A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Johor

1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Medan Johor	40
2. Letak Geografis Kecamatan Medan Johor	41
3. Demografis Kecamatan Medan Johor	43
a. Data Kependudukan Berdasarkan Suku	43
b. Data Penduduk Menurut Agama	44
c. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian	45
d. Data Penduduk Menurut Status Kewarganegaraan	44

e. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	46
B. Jumlah Rumah Ibadah dan Sarana Pendidikan Di	
Kecamatan Medan Johor	46
1. Jumlah Rumah Ibadah	46
2. Sarana Pendidikan	47
a. Data Kependudukan Berdasarkan Jumlah PAUD ..	47
b. Data Kependudukan Berdasarkan Sarana	
Pendidikan	48
C. Asal Usul dan Adat Istiadat Mandailing	48
1. Adat dan Pengertiannya	48
2. Mandailing dan Asal Usulnya	50
3. Adat Istiadat Mandailing	51
D. Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Mandailing	54
1. <i>Mangaririt Boru</i>	55
2. Pertunangan (<i>patobang hata boru</i>).....	56
3. Penentuan Hari	56
4. Markata (<i>Markobar Boru</i>)	57
5. Akad Nikah	57
6. Resepsi	58
E. Mahar Menurut Hukum Adat Mandailing	59
1. Pengertian Mahar	59
2. Sejarah Tentang Mahar dalam Adat Mandailing	61
3. Jumlah dan Bentuk Mahar (<i>sinamot</i>)	62

4. Kedudukan mahar dalam perkawinan menurut adat Mandailing	63
5. Tujuan Mahar dalam Perkawinan Adat Mandailing ...	64
6. Penetapan Mahar	65

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DAN HUKUM ISLAM

A. Penentuan Mahar dalam Perkawinan Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Mandailing ...	74
a. Mahar Adat	74
b. Penentuan mahar adat	77
2. Penentuan Mahar Menurut Hukum Islam	78
a. Mahar Menurut Hukum Islam	78
b. Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam	80
c. Penentuan Mahar Menurut Hukum Islam	81

B. Persamaan Penentuan Mahar Perkawinan dalam Adat Mandailing dan Hukum Islam

Persamaan praktik penentuan mahar adat Mandailing dan hukum Islam	82
a. Persamaan dalam hukum	82
b. Mahar yang berlaku	83

C. Perbedaan Penentuan Mahar Perkawinan Adat Mandailing dan Hukum Islam

1. Perbedaan praktik penentuan mahar adat Mandailing dan Hukum Islam	84
a. Perbedaan dalam sumber hukum	84
b. Penerima mahar	85
c. Penentuan jumlah mahar	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	91

DARTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan Teks Arab	I
Biografi Tokoh Ulama	III
Rincian Pertanyaan Wawancara	V
Transkrip Wawancara Tokoh Adat	VII
Curriculum vitae	XXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sejatinya ialah untuk memperoleh kehidupan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya Insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.¹ Dalam hukum perkawinan Islam mahar mendapatkan pembahasan secara tersendiri. Karena mahar termasuk bagian dari syarat sah dalam perkawinan, maka dirangkaikan dengan rukun dan syarat.²

Indonesia merupakan negara kepulauan yang majemuk, terdiri dari berbagai suku dan bangsa, setiap suku dan bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda yang telah ada dan terjaga turun temurun dari leluhur mereka. Sistem perkawinan menurut hukum adat ada tiga; pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya, akan tetapi ia harus menikahi seseorang diluar

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta, ACAdemia + TAZZAFa, 2013) edisi revisi, hlm. 43.

² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 64.

marganya (klen-patrilineal). Kedua *endogami*, dimana seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita diluar kerabat. Ketiga *eleutherogami*, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita diluar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya praktik upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.³ Banyak hal yang menjadi kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut *syar'i*, hal mana yang diketahui bahwasanya masyarakat telah terkontaminasi oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi sebuah ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan perkawinan, sehingga tidak jarang perkawinan itu justru menyimpang dari tujuan yang agung sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh adat istiadat nenek moyangnya yang telah diwarisi secara turun temurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan dibanding dengan ajaran Islam, seperti halnya dengan *sinamot* dalam masyarakat Mandailing.⁴

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 97.

⁴ Wawancara dengan Bapak Dzulkarnain Rangkuti, Tokoh Adat, tanggal 05 Januari 2018.

Mahar perkawinan biasanya dilakukan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan. Di beberapa daerah misalnya; di Aceh mahar perkawinan ini dinamakan *jinamee*, di Sulawesi-Selatan dinamakan *sunrang* dan *sompa*, di Minahasa dinamakan *hoko*, serta di daerah Melayu dikenal dengan *uang hantaran* yang artinya pengikat.⁵

Mahar perkawinan di adat Mandailing dan Batak pada umumnya dikenal dengan istilah *sinamot/tuhor*. Disebut sebagai *sinamot* atau *marhata sinamot* karena ini merupakan jual beli antara pihak laki-laki dan perempuan atau dapat juga dikatakan sebagai mas kawin. Mas kawin ini dapat berupa suatu harta ataupun benda yang diberikan suami pada saat atau sebelum prosesi perkawinan kepada istri sebagai suatu syarat perkawinan. *Marhata sinamot* adalah salah satu acara adat pada perkawinan orang Batak, Merupakan suatu acara untuk menjajagi sejauh mana beban yang dapat dipundak oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, agar perkawinan itu dapat dilaksanakan.⁶ Adanya pemberian *sinamot* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Sinamot* memegang suatu peranan penting di dalam adat masyarakat Mandailing terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *sinamot* yang dibebankan kepada calon suami.

⁵ B. Ter Haar, *Adat Law In Indonesia*, (Jakarta: Bathara, 1962), hlm. 198-199.

⁶ DJ. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (CV. Armada-Medan, 1992), hlm. 290.

Pemahaman terhadap *sinamot* di masyarakat pada umumnya lebih condong kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian *sinamot* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *sinamot* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya diperuntukkan kepada si wanita pribadi atau pun keluarganya sebagai simbol “pemberian perkawinan”, yang serupa dengan maskawin (mahar perkawinan) dalam hukum Islam.

Mahar dalam perspektif Islam maupun *sinamot* dalam perspektif hukum adat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar keberadaannya. Mahar merupakan suatu yang inheren dalam suatu perkawinan. Mahar atau *sinamot* dalam tradisi adat masyarakat Mandailing, bahwa keduanya merupakan suatu yang wajib adanya dalam suatu perkawinan, menjadikan masyarakat memahami keduanya yaitu mahar/maskawin adalah sama artinya dengan *sinamot*.

Mahar suatu pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita baik jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.⁷ Hal ini selaras sebagaimana dengan firman Allah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً⁸

⁷ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 30 (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm. 27

⁸ An-Nisa' (4): 4.

Mahar dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama' merupakan syarat sahnya nikah.⁹ Kecuali mazhab Malikiyah memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah.¹⁰

Pemberian *sinamot* (mahar) yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat adat Mandailing sebenarnya merupakan keseluruhan dari rangkaian acara adat dalam perkawinan, dimulai dari pemberian hadiah (*marriage portion*) dari kedua belah pihak calon pengantin, kemudian membahas harga mahar, kesepakatan harga mahar, hingga penentuan waktu pengantaran mahar kepada calon istri. Semua itu dalam adat Mandailing disebut sebagai *sinamot* atau *marhata sinamot*. Antara lamaran, membahas harga mahar, sepekatan harga mahar, hingga penentuan pengantaran masing-masing memiliki waktunya sendiri dan tidak dilakukan dalam satu waktu. Selanjutnya dalam praktiknya di lapangan sosial masyarakat, bahwa pemberian *sinamot* dalam adat perkawinan dapat diberikan dahulu pada saat prosesi peminangan. Pada saat inilah terjadi suatu musyawarah antara masing-masing juru bicara adat, kepala adat, dan keluarga calon suami dan istri sebagai suatu kompromi tentang penentuan kadar dan jumlah serta bentuk *sinamot* dikuasakan penuh kepada pihak calon istri. Dalam hal ini ketentuan *sinamot* di ukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan ditambah dengan jabatan dalam pekerjaannya (kalau misalkan bekerja). Hal ini yang

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 110.

¹⁰ Abd. Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al Fiqh al-Mazahib Al-'Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tajariyah Al-Kubra, 1969), IV: 12

membuat harga *sinamot* dalam adat Mandailing sangat mahal sebab semuanya nantinya dipergunakan bersama dalam rumah tangga seperti lemari, kasur, peralatan dapur, dan peralatan rumah tangga lainnya, serta pakaian si istri. Dalam adat Mandailing semua itu akan dianggap merupakan mahar kepada calon istri. Akan tetapi kesemua itu akan tetap melalui kata sepakat antara kedua belah pihak kalau kalau secara kemampuan sangat memberatkan dan menjadi jumlah harga yang pasti bagi mereka yang mampu dan sanggup memenuhinya.¹¹

Sekarang keahlian kaum wanita sudah sedemikian majunya sehingga pihak wanita telah mengetahui ilmu di berbagai bidang kemasyarakatan sehingga tuntutan persamaan hak perlakuan sudah semakin meningkat. Oleh karena itu pihak wanita sudah tidak mau diperlakukan seperti barang dagangan tapi harus saling hormat menghormati kedua belah pihak. Datang satu pengertian bahwa penyerahan dari pihak laki-laki hanya sebagai bantuan kepada pihak wanita untuk lebih melengkapi keperluan bawaan pihak boru dan bantuan supaya pesta keberangkatan dapat dilaksanakan lebih sempurna.¹²

Agama Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengikat, namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak wanita dengan pihak laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ramly Harahap, Tokoh Adat, tanggal 04 Agustus 2017.

¹² Syahmerdan Lubis, *Adat Hangoluan Mandailing*, hlm. 145.

nilai, juga halal menurut *syari'at* Islam.¹³ Seperti halnya yang terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu mahar berupa sebarang cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan kalimat syahadatain dan mengajarkan al-Qur'an.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah dan cenderung menyederhanakan serta memudahkan penunaian suatu mahar.

Terkait dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul: "*Sinamot Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan Medan Johor (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)*". Dengan skripsi ini penyusun tertarik untuk memahami bagaimana konsep pelaksanaan adat *sinamot* dalam perkawinan yang terjadi di dalam adat Mandailing.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas pokok masalah yang telah di paparkan, maka dapat ditarik pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan *sinamot* dalam tradisi perkawinan adat Mandailing dan mahar dalam hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penentuan *sinamot* dalam perkawinan adat Mandailing dan mahar dalam Hukum Islam?

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk, cet. 15 (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 367-368.

¹⁴ Muslim, *H.R. ahik Muslim*, jilid I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-'Arbiyah, t.t), hlm. 596.

C. Tujuan dan kegunaan

Dari pokok masalah diatas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui penentuan *sinamot* dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing dan penentuan mahar dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penentuan *sinamot* dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing dan mahar dalam hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis :

- Sebagai gagasan tentang penentuan mahar yang sesuai dengan ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat khususnya masyarakat adat Mandailing yang akan melangsungkan pernikahan.
- Untuk menambah khazanah keilmuan keislaman dan untuk pengembangan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat adat Mandailing.

2. Manfaat praktis :

- Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang ketentuan *sinamot* dalam masyarakat adat Mandailing dan pengetahuan tentang mahar dalam hukum Islam khususnya bagi umat Islam pada umumnya.
- Sebagai bahan kajian untuk menyelesaikan masalah dalam penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Mandailing.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang mahar dalam budaya Indonesia sudah banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian yang telah tertuang dalam bentuk tulisan dan buku-buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika perkembangan budaya ini, akan tetapi kajian yang membahas *sinamot* dalam adat Mandailing (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam) belum ada.

Gatot Susanto dalam skripsi “Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”, (jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010). Dalam penelitian ini penyusun membatasi masalah pada: Bagaimana konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat Dayak di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam adat perkawinan di masyarakat Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan *Normatif*, *Urf*. Kesimpulannya yaitu pemberian *palaku* dalam adat perkawinan di desa Pangkalan Dewa dipengaruhi oleh faktor adat kebiasaan yang berjalan di masyarakat setempat. Pelaksanaannya itu sendiri melalui beberapa tahapan yaitu upacara *maja misek* (musyawarah), dalam upacara adat ini biasanya pihak calon suami mendatangi kediaman calon istri

untuk melanjutkan pembahasan setelah upacara *hakumbang auh* (peminangan) yaitu untuk bermusyawarah menentukan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diantaranya yaitu pendapatan besar kecilnya pemberian maskawin (*palaku*). Praktek pemberian *palaku* dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa bisa dimasukkan dalam kategori sebuah adat-istiadat atau kebiasaan yang baik. Hal ini didasarkan dari proses penetapan pemberian *palaku* yang didahului musyawarah (*maja misek*) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan besar dan bentuk pemberian *palaku*.¹⁵

Muh. Nurhidayatulloh dalam skripsi “Studi Hukum Islam Tentang Rekayasa Nilai Mahar Di Desa Pucangan Kecamatan Palang kabupaten Tuban”. (jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999). Dalam skripsi ini penyusun membatasi pokok masalah pada: Bagaimana penentuan mahar dalam perkawinan di Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban? Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap penentuan mahar di Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif*, *Urf*. Skripsi ini membahas tentang adanya rekayasa nilai mahar yang dijadikan strategi untuk keluar dari problem. Yakni pemberitaan mahar yang tidak sesuai dengan kenyataan karena adanya keharusan dari tradisi/adat yang berlaku di Desa Pucangan, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pemberitaan

¹⁵ Gatot Susanto, “Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”, *skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah, 2010.

mahar dapat terjadi pada waktu sebelum, sesudah atau pada saat akad pernikahan. Oleh karenanya mayoritas mahar di berikan dalam bentuk hutang.¹⁶

Syamsul Rizal dalam skripsi “Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)”. (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003). Skripsi dibahas dengan dua pokok masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan penetapan mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Inginjaya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Inginjaya. Skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif*, *Urf*. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang penetapan mahar dilaksanakan dengan saat peroses peminangan, kemudian juga dalam hal penentuan kadar dan jumlah mahar, pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya; faktor keturunan, dan faktor taraf pendidikan perempuan.¹⁷

Nurfiah Anwar dalam skripsi “Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Hukum Islam”. (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006). Dua permasalahan pokok yaitu: Bagaimana latar belakang pemikiran tokoh

¹⁶ Muh. Nurhidayatulloh, “Studi Hukum Islam Tentang Rekayasa Nilai Mahar Di Desa Pucangan Kecamatan Palang kabupaten Tuban”, *skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999.

¹⁷ Syamsul Rizal, “Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)”, *skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

masyarakat Bone tentang pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan mereka? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone, serta dampak yang ditimbulkan bagi perkawinan itu sendiri. Dalam skripsinya penulis menggunakan metode *normatif*, *sosiologis*. Dalam penelitiannya menemukan bahwa praktik mahar dalam adat perkawinan Bugis Bone hanya terpelihara dalam bentuk pengucapan (lisan) mahar dan menjelaskan bahwa fenomena pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan Bugis Bone hukumnya mubah dilaksanakan sepanjang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai kadar dan jumlah mahar. Karena pada dasarnya mahar mengandung kesederhanaan.¹⁸

E. Kerangka Teori

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Suatu *variabel* merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda, atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁸ Nurfiah Anwar, "Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Hukum Islam", *skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), edisi revisi, hlm. 25.

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia, yang bergaul didalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik yang bersifat batiniyah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkalang tanah. Dimana ada masyarakat, disitu ada Hukum adat. Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.²⁰

Perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang dalam pergaulan (*interaksi sosial*) –nya dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka yang dilakukan kembali secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat kebiasaan pada masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tidak tertulis, yang menjadi hukum bukan karena ditetapkan, melainkan karena terulang-ulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri), dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan hukum.²¹

²⁰ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 29-30.

²¹ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 130.

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi umat beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, diperlukan pemecahan atas masalah tersebut.²²

Untuk melihat realitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat khususnya menyangkut mahar, baik menurut hukum Islam maupun adat dan tradisi masyarakat Mandailing yang berlaku akan digunakan *teori exchange* atau teori pertukaran. Teori ini dipergunakan untuk melihat apa sebenarnya makna mahar baik dalam hukum Islam maupun mahar dalam tradisi masyarakat adat Mandailing.

Teori Pertukaran Sosial (*social exchange theory*) merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa interaksi sosial dan hubungan sosial secara hukum merupakan sebuah mekanisme pertukaran sosial.²³ Peter Baul salah satu penemu teori pertukaran sosial menjelaskan;

Pertukaran sosial dapat diobservasi dimana saja. Kita dirangsang untuk selalu peka terhadap hukum dalam pertukaran sosial ini, yang tidak

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 85.

²³ Istilah pertukaran sosial merupakan istilah atau teori sosiologi. Teori ini kemudian dikenal dengan *exchange theory*. Lebih lanjut lihat; Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, (Illions: The Dorsey Press, 1978), hlm. 201-215.

hanya terjadi dalam hubungan pasar saja, tapi juga dalam pergaulan, persahabatan dan bahkan percintaan. Dalam banyak hubungan sosial, pertukaran sosial ini akan berkembang membentuk suatu keakraban dan persahabatan bahkan dapat membentuk hubungan hukum dalam sosial misalnya saja dalam suatu pernikahan.²⁴

Dalam kerangka teori diatas, terlihat bahwa setiap pola relasi dan interaksi dalam kehidupan masyarakat apapun bentuknya telah terjadi sebuah proses hubungan sosial yang mengandaikan adanya pertukaran diantara masing-masing kelompok dalam membentuk kesatuan dan solidaritas. Kaitannya dengan mahar bahwa seorang laki-laki harus membayar mahar kepada perempuan disamping adanya suatu keharusan struktural, yaitu wajibnya membayar mahar dalam hukum Islam bagi orang muslim, juga adanya sesuatu yang mendorong mereka melaksanakan kewajiban mahar, yaitu hak senggama atau hubungan seksual. Dalam artian pertukaran yang terjadi melalui mahar antara suami dan isteri. Hal ini juga berlaku dalam tradisi masyarakat adat Mandailing, dimana mahar dalam tradisi masyarakat tersebut jumlah mahar ditetapkan sesuai dengan strata sosial.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adala hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi

²⁴ Adam Podgorecki dan Christoper J. Whelan, (ed.), *Penekanan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 213.

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.²⁵ Bahwa teori-teori tentang mahar termasuk dalam hukum perkawinan Islam kecuali Maliki, tidak menjadikan mahar sebagai syarat sah perkawinan tetapi pemberian wajib. Mahar dalam hukum Islam dibagi menjadi dua macam adalah sebagai berikut:²⁶

1. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* merupakan mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

2. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *Mitsil* yaitu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga dekat, atau tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Mahar (maskawin) perkawinan merupakan suatu hal yang pokok dan harus ada dalam suatu perkawinan meskipun nilai ataupun jumlahnya sangat minim, dalam praktiknya dianjurkan untuk mempermudah jumlah mahar yang harus ditunaikan. Besarnya mahar tidak dibatasi, akan tetapi islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara ma'ruf. Artinya

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, kencana prenatal media group 2003), cet. Ke-1, hlm. 85.

²⁶ Timahi, *Kajian Fiqih I Nikah lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 45-46.

dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan atau sesuai dengan kepantasan (*mitsil*), tetapi dengan catatan penting bahwa mahar tidak boleh memberatkan.²⁷ Dengan demikian pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan diluar akad nikah, atau apa yang ia berikan kepada wanita lain saat berlangsungnya akad tidak termasuk mahar, melainkan hanya pemberian biasa.²⁸

Dari sini bisa dilihat, sesungguhnya syari'at Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan umum manusia baik materiil, spiritual, ataupun kepentingan sosial. Syari'at Islam memelihara kepentingan tersebut atas dasar keadilan dan keseimbangan tanpa melewati batas ataupun menimpakan kerugian.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara pengumpulan data atau bukti yang dalam hal ini perencanaan tindakan yang dilaksanakan serta langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.³⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta, ACAdemia + TAZZAFa, 2013) edisi revisi, hlm. 131.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 85.

²⁹ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 53-54.

³⁰ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 1998), hlm. 78.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil objek penelitian masyarakat adat Mandailing di Kecamatan Medan Johor, Medan. Lokasi ini ditetapkan secara sengaja karena masyarakat yang beradat Mandailing mayoritas Islam yang taat serta memiliki hukum adat yang dipegang kuat oleh masyarakat adat.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah jenis penelitian *deskriptif, analitik dan komparatif*, penelitian yang berbentuk data bukan angka, proses penelitian yang berkesinambungan, yang mana tahap penumpulan data, pengelolaan data, dan analisa data dapat dilakukan bersamaan selama proses penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan empiris dan yuridis sosiologis. Pendekatan empiris merupakan penelitian yang bersifat menjelajah (*eksplorator*), melukiskan (*deskriptif*) dan menjelaskan. Penelitian yang berfokus untuk meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dan yuridis sosiologis itu sendiri adalah pendekatan yang didapat langsung dari masyarakat ataupun lokasi yang diteliti berdasarkan hukum.³¹

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Grafika, 1990), hlm. 16.

4. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang diwawancarai dalam penyusunan penelitian seperti empat tokoh adat, satu tokoh agama, dan satu pelaku adat dalam adat Mandailing.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah sangat penting dalam metode ilmiah, guna mendapatkan data secara valid dan akurat, penyusun menggunakan teknik *interview* gunanya adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penyusun dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³² Jenis wawancara ini dipilih agar wawancara yang dilakukan tidak terkesan kaku ketika bersama partisipan serta penyusun bisa lebih mudah untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dari jawaban yang diberikan.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu baik itu buku, serta karya tulis lainnya yang berfungsi sebagai data primer sejauh mana data tersebut ada dan berhubungan dengan subjek penelitian.

b. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif induktif*, yaitu menganalisa data yang dikumpulkan oleh

³² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

peneliti, kemudian diuraikan dan dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, penyusun membagi menjadi lima bab, yang merupakan tiga bagian besar yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab penutup.

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, semua itu adalah pengantar untuk memasuki pembahasan.

Bab *kedua* bagian awal pembahasan, berisi gambaran secara umum mengenai mahar dalam perspektif hukum Islam meliputi: pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar, bentuk mahar, jumlah mahar, kadar mahar, gugurnya mahar, waktu pemberian mahar, pemegang mahar, hikmah disyari'atkannya mahar. Hal ini dimasukkan supaya untuk mempermudah penyusun dalam melanjutkan pembahasan.

Pembahasan berikutnya adalah bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum tentang *sinamot* di dalam adat Mandailing, meliputi; wilayah penelitian, sistem sosial kemasyarakatan, dan bentuk perkawinan yang ada di masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang konsep pemberian *sinamot* (mahar) dalam perkawinan dengan sub bab; adat dan pengertiannya, pengertian *sinamot*, latar belakang, ketentuan dan proses, kedudukan mahar,

dalam adat Mandailing, macam-macam mahar dalam adat Mandailing dan tujuan mahar dalam perkawinan adat Mandailing.

Bab *keempat* yang berisi sebagai pembahasan utama, penyusun menguraikan tentang penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat adat Mandailing dan kemudian persamaan dan perbedaan penentuan mahar adat perkawinan masyarakat Mandailing dan hukum Islam.

Bab *kelima* adalah berisi penutup, yang merupakan akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan dan berharga, guna mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju dalam studi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, baik data yang diambil secara wawancara, dokumentasi, maupun referensi yang terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan *sinamot* (mahar) dalam adat Mandailing dalam praktiknya disepakati dengan cara musyawarah bersama dan penetapannya pun dilakukan dengan terbuka antara kedua belah pihak serta para raja (*Harajaon*) dengan jumlah dan bentuk yang diminta oleh keluarga pihak perempuan bukan apa yang diminta oleh mempelai perempuan dan pada umumnya dilihat dari strata sosial calon isteri yang akan dinikahi misalnya dalam hal pendidikan. Akan tetapi kalau tidak sanggup dengan jumlah yang ditetapkan oleh pihak mempelai perempuan masih bisa dilakukannya negosiasi hingga terjadi kesepakatan bersama dan bagi yang mampu menyanggupi jumlah dan bentuk mahar yang ditentukan pihak keluarga perempuan maka jumlah dan bentuk mahar tersebut sudah menjadi harga pasti tanpa adanya negosiasi lagi. Apabila pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi dan tidak ada kesepakatan akan terjadi penundaan dan bahkan terjadi pembatalan pernikahan menurut adat. Bahkan ada juga *sinamot* itu biasa dibayar dengan cara berhutang dengan

ketentuan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dibenarkan menyulitkan mahar dan memberatkan mempelai laki-laki dalam pemberian mahar, akan tetapi hukum Islam tidak melarang memberikan mahar dengan jumlah yang tinggi asalkan tidak memberatkan salah satu pihak. Islam juga tidak membenarkan dalam mempersulit perkawinan. Islam sangat menganjurkan untuk memudahkan perkawinan.

2. Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam penentuan mahar yang berlaku secara adat dan menurut hukum Islam. Dalam praktiknya mahar yang berlaku secara adat dan secara hukum Islam di masyarakat adat Mandailing mempunyai kedudukan yang sama yaitu wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu juga dengan yang berlaku bahwa barang yang diberikan kepada mempelai perempuan merupakan barang yang berharga dan bernilai, bukan barang curian. Dari segi jenis mempunyai kesamaan bahwa pemberian mahar adat tidak hanya dengan memberikan uang akan tetapi bisa dengan sebidang tanah, hewan ternak, dan hasil pertanian dan barang yang lain yang jelas adanya dan bukan barang curian. Akan tetapi penentuan mahar tersebut memiliki perbedaan dalam sumber hukumnya bahwa mahar dalam hukum Islam bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadis. Dalam adat Mandailing ketentuan mahar dalam upacara perkawinan merupakan ketentuan adat yang berlaku yang dikenal dengan

istilah “*Daliha Na Tolu*” sehingga setiap kegiatan atau hal yang menyangkut dengan adat harus terpenuhi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Mahar dalam adat Mandailing sifatnya memaksa dalam hal strata sosial sehingga ada juga yang merasa terberatkan dengan nilai mahar yang tinggi. sedangkan dalam hukum Islam sendiri mahar merupakan apa yang diinginkan mempelai perempuan bukan apa yang diinginkan pihak keluarga perempuan.

B. Saran-saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati penetapan mahar dalam adat Mandailing, adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini penyusun dengan besar hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penetapan mahar secara adat setidaknya harus seimbang, karena mahar merupakan hak prioritas perempuan dalam menerimanya, sedangkan mahar secara adat merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan adat dalam upacara perkawinan dan dihabiskan dalam pernikahan meskipun nantinya akan dinikmati berdua dalam berumah tangga.
2. Penentuan mahar secara adat perlu diperhatikan cara penentuan, ditentukan secara sederhana saja karena penentuan mahar yang cukup besar mempunyai dampak yang tidak maksimal dalam rangkaian perkawinan bagi laki-laki untuk membangun suatu hubungan rumah tangga karena ketidak mampuan dalam membayar mahar yang

ditentukan sehingga kadang terjadi kawin lari dan perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang paling hina di Mandailing.

3. Kepada tokoh adat kiranya untuk lebih melihat kepada konteks agama dalam pengaturan pernikahan khususnya penetapan mahar adat, kepada tokoh agama agar mendahulukan *Nash* dalam mengambil keputusan di banding adat istiadat, supaya tidak terjadi perkawinan yang hina di adat Mandailing seperti kawin lari, kepada orang tua calon istri agar lebih melihat kepada kebahagiaan anak dan keadaan ekonomi pihak calon suami, kepada pemuda jangan boros, mulailah berpikir untuk masa depanmu, jangan sampai menyusahkan kepada orang tua, kepada pemuda pelajari Syari'at. Jangan sampai hakmu dirampas oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al -Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Şabuni, Muhammad Ali as-, *Mukhtaşar Tasir Ibn Kaşir*, (Beirut: al-Maktabah al-aşriyah, 2011), I.

Hadits

Ṭirmizi, Muhammad bin Isa aṭ, *Sunan aṭ-Ṭirmizi*, edisi Basyar Awad Ma'ruf, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998.

Fikih

Abdullah, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 30, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Husaini, Abu Bakar bin Muhammad al, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.

Jaziry, Abd. Rahman al, *al Fiqh 'Ala Mazhahib Al- 'Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tajariyah Al-Kubra, 1969.

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV. Al-Hidayah Djakarta, 1968.

Khasyt, Muhammad Utsman al, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

- Mudhor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk, cet. Ke-15, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad, Musein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. VI, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Mujieb, M. Abdullah, *Kamus Ilmiah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Qaradhawi, Yusuf al, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995, I, alih bahasa: As'ad Yasin.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Juz II*, Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I'lam Al-Arabiyy, 1999.
- _____, *Fiqh Sunnah V*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib. M, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, cet. 1, Bandaung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Timahi, *Kajian Fiqh 1 Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Usman, Iskandar, *Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, II
- _____, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004, IX

Buku-buku

- Abu, Abbas Adil Mun'im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Effendi, Ahmad Aziz Dahlan dan Satria, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, cet II, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Haar, B. Ter, *Adat Law In Indonesia*, Jakarta: Bathara, 1962.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Nosution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+Tazafa, 2012.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Skripsi

Anwar, Nurfiah, yang berjudul “Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Hukum Islam”, *Skripsi* pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Nurhidayatulloh, Muh, “Studi Hukum Islam Tentang Rekayasa Nilai Mahar Di Desa Pucangan Kecamatan Palang kabupaten Tuban”, *Skripsi* pada jurusan Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999.

Rizal, Syamsul, “Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Susanto, Gatot, “Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah, Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* pada jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Umum

Lubis, Syahmerdan, *Adat Hangoluan Mandailing, Tapanuli Selatan*.

Nasution, Pandapotan, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, cet. Pertama, FORKALA Prov. Sum. Utara, 2005.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Purwandari, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 1998.

Rajamarpodang, DJ. Gultom, *Daliha Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, CV. Armanda-Medan, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Grafika, 1990.

Wawancara

Bakhsan Parinduri, 05 Februari 2018.

Dzulkarnain Rangkuti, 05 Januari 2018.

Muhammad Ali Hasibuan, 25 Desember 2018.

Ramli Harahap, 04 Agustus 2017.

Lain-lain

<http://akucintaMandailing.wordpress.com> Pangaduan Lubis, Sejarah Mandailing.

<http://sirajasonang.wordpress.com> Marwan Dalimunthe, *Adat Daliha Na Tolu*.

LAMPIRAN

Terjemahan Teks Arab

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1	4	1	8	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Q.S An-Nisā' (4);4)
2	25	2	13	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisā' (4);4)
3	25	2	14	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (Q.S An-Nisā' (4);24)
4	26	2	15	Karena itu kawinilah mereka dengan dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. (Q.S An-Nisā' (4);25)
5	26	2	16	Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW dan dia berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah menawarkan diriku kepadamu dan dia telah berdiri dalam waktu yang lama. Dan berdirilah seorang laki-laki. Wahai Rasulullah: Kawinkanlah aku dengannya jika engkau tidak berhajat kepadanya. Rasulullah bersabda: Adakah padamu itu sesuatu yang dapat kau sedekahkan (mahar) kepadanya? Dan laki-laki itu berkata: Tidak ada padaku sesuatu kecuali sarungku ini. Dan Nabi bersabda: Jika kau memberikan sarung ini kepadanya maka kau tidak akan mempunyai sarung lagi. Carilah yang lain. Laki-laki itu berkata: aku tidak punya yang lain. Nabi bersabda: Carilah walau satu cincin besi. Dan laki-laki itu mencaritidak ada apa-apa yang ia dapatkan. Nabi bersabda: Apakah padamu ada hafalan daripada Al-Qur'an? Laki-laki itu berkata: ya, surat ini, surah ini. Dan dia menyebutkan surah-surah yang dia hafal. Dan Nabi bersabda: Aku nikahkan engkau dengan mahar hafalan Qur'an yang ada padamu. (H.R At-Tirmidzi)
6	27	2	17	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka

				janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisā' (4);20-21)
7	30	2	21	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. (Q.S An-Nisā' (4);20)
8	31	2	24	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah (2);237)
9	32	2	27	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S Al-Baqarah (2);236)
10	79	4	10	Karena itu kawinilah mereka dengan dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. (Q.S An-Nisā' (4);25)

LAMPIRAN

Biografi Tokoh Ulama

1. Prof. Dr Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, pada Tahun 1939. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syari’ah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang syari’ah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Disana beliau mendalami ilmu fiqh serta ilmu ushul fiqh dan mengajar di Fakultas Syari’ah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafiz Qur’an dan mencintai As-Sunnah.

2. Sayyid Sabiq

Syekh Sayyid Sabiq lahir tahun 1915 di Mesir dan meninggal pada bulan Februari tahun 2000. Mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Ummul Qura Mekkah, Arab Saudi, dan sempat menjejar di kedua universitas tersebut. Syekh Sayyid Sabiq Hafidz Al-Qur’an pada usia sembilan tahun. Awal mula beliau menulis materi-materi fiqh dan mengajar untuk anggota Ikhwanul Muslimin. Atas anjuran Imam Hasanah-Banna, materi-materi tersebut dibukukan, yang awalnya berupa buklets berseri. Kemudian digabungkan, maka jadilah kitab rujukan fiqh yang ada sekarang ini. Pada tahun 1994 berkat buku Fiqh Sunnah ini, Syekh Sayyid Sabiq memperoleh penghargaan King Faisal Prize dalam bidang kajian Islam.

3. At-Tirmidzi

Sunan At-Tirmidzi memiliki nama lengkap Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa as-Sulaimi at-Tirmidzi. Dan memiliki nama kunyah Abu ‘Isa. Beliau lahir pada tahun 209 H di sebuah daerah bernama Tirmidz dan meninggal di Tirmidz pada malam senin 13 Rajab tahun 279 H dalam usianya 70 tahun. Beliau belajar dan meriwayatkan Hadist dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya Imam Bukhari, kepadanya ia mempelajari Hadist dan fiqh. Juga ia

belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Ia juga yang menyusun kitab *Sunan at-Tirmidzi* dan *Al-Ilal*.

4. Hilman Hadikusuma

Hilman dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara, 9 Juli 1927, anak tunggal pasangan Abdulhadi dengan Hasanah. Hilman, pakar hukum adat dari Fakultas Hukum Unila, memang melegenda. Nyaris seluruh literatur hukum adat yang digunakan di hampir semua fakultas hukum di Tanah Air memakai buku karangannya. Pada 1941 Hilman menyelesaikan Holland Inlandse School (HIS) Ardjuna Tanjungkarang. Selang sekian tahun, pada 1950 Hilman melanjutkan ke Sekolah Ekonomi Pertama (SMEP) Jakarta. Sambil bekerja di berbagai instansi pemerintah di Jakarta, di antaranya Kantor Besar Kepolisian Djakarta Raja dan Kantor Pusat Statistik, Hilman menyelesaikan Sekolah Menengah Atas Sosial Ekonomi di Jakarta, 1953. Dari 1954--1960, dia bekerja di Departemen Kehakiman di Jakarta. Beliau wafat pada 30 Agustus 2006 dalam usia 79 tahun.

LAMPIRAN

RINCIAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana penentuan mahar seorang wanita dalam perkawinan yang ada di adat Mandailing ?
2. Apakah penentuan mahar bagi wanita yang masih gadis, sudah bercerai atau janda sama saja ?
3. Bagaimana praktek penentuan mahar dalam perkawinan adat Mandailing?
4. Apakah penentuan mahar bagi seorang wanita ditentukan berdasarkan strata sosial?
5. Apakah ada ketentuan mahar bagi seorang wanita yang akan dinikahi secara adat dalam Mandailing?
6. Apakah penentuan mahar tidak akan memberatkan bagi seorang laki-laki yang akan melamar wanita tersebut?
7. Apakah penentuan mahar di Adat Mandailing merupakan adat istiadat yang sudah tidak bisa diubah lagi?
8. Apakah seluruh masyarakat Adat Mandailing mengikuti adat?
9. Bagaimana sejarah dan asal usul penentuan mahar yang ada di Adat Mandailing ?
10. Bagaimana sistem kepercayaan masyarakat Adat Mandailing tentang penentuan mahar tersebut ?
11. Bagaiman proses peminangan hingga terjadinya suatu pernikahan ?
12. Apa perbedaan mahar di Adat Mandailing dengan di Toba dan Angkola ?
13. Bagaimana aspek hukum Sinamot dalam Adat Mandailing sebagai tradisi?

14. Apakah tujuan Sinamot sebagai mahar adat untuk istri atau sarana berkeluarga?
15. Bagaimana hukum Sinamot dalam Adat Mandailing ?
16. Apa pengertian mahar menurut tokoh Adat ?
17. Bagaimana penentuan Jumlah mahar dan apa saja bentuk maharnya?
18. Apa tujuan Sinamot dalam perkawinan Adat Mandailing ?
19. Bagaimana kedudukan mahar dalam perkawinan Adat Mandailing ?

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara dengan Bapak Bakhsan Parinduri

Aspek hukum mahar dalam adat Mandailing hukumnya wajib, akan tetapi kita lihat terlebih dahulu bahwa dalam adat Mandailing pernikahan itu ada tiga macam, yaitu *marlojong* (kawin lari), *tangku binoto* (kawin lari, akan tetapi orang tuanya tau) akan tetapi dalam *tangku binoto* ini ada halangan istilah dalam orang tua terdahulu diizinkan tapi harus pergi meninggalkan adat dan hal ini merupakan salah satu cara untuk hilang/lari dari adat yang berat itu, kemudian *pabuat sapanjang adat* (dilakukan dengan secara adat utuh/penuh) itulah yang dipabuat. Munculnya mahar ini seperti yang disebutkan pada yang dua itu tadi yang *tangku binoto* dan *pabuat sapanjang adat*. kalau yang pabuat sapanjang adat harus mengikuti tatanan adat sepenuhnya. Kemudian ada mahar yang sudah tidak ada kesesuaian di awal. Contohnya: seorang perempuan ingin kawin dengan laki-laki, tetapi perempuan ini masih punya kakak.

Upacara adat saat ini yang sering dilakukan masyarakat adat Mandailing adalah: (1) upacara adat *Siriaon/Horja Haroan Boru/Pabuat Boru* (Upacara adat perkawinan), (2) upacara adat *Siluluton/Mambulungi* (upacara adat kematian), (3) *Horja Siulaon* (upacara adat berkarya). Setiap masyarakat adat Mandailing yang sudah berumah tangga otomatis menjadi anggota dalam melaksanakan *Daliha Na Tolu* serta bertanggung jawab menyelesaikan upacara adat *siriaondan* upacara adat *siluluton* ditengah-tengah masyarakat adat tersebut.

Menurut hukum adat Mandailing mahar adalah sesuatu yang wajib yang diberikan calon suami kepada calon istri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini pemberian mahar sebagai bukti keseriusan dan rasa kasih sayang seorang laki-laki kepada calonnya dan sejauh mana kesanggupan dan keseriusan yang akan dilihat dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Mahar ditentukan berdasarkan permintaan pihak calon istri dan disesuaikan berdasarkan strata sosial ataupun berdasarkan kemampuan pihak laki-laki dalam memberi mahar. Semahal apa pun mahar yang akan ditentukan calon mempelai wanita pasti adat itu yang akan menyelesaikannya dengan kesanggupan orang masing-masing dengan kesepakatan bersama dan keterus terangan orang tua dari pihak laki-laki kalau misalnya pihaknya tidak sanggup dengan jumlah yang ditentukan pihak wanita.

Kalau menurut saya, mahar sebelum Islam adalah mahar yang wajib diberikan yang telah disepakati, diberlakukan dan dilaksanakan seperti para nenek moyang orang Mandailing terdahulu melaksanakannya dan wajib bagi setiap masyarakat adat menjalankannya dengan tidak mengurangi atau menambah-nambah ketentuan adat yang ada. Artinya pada zaman sebelum Islam masuk ketentuan adat dalam hal pernikahan khususnya masih kaku dan dipaksa untuk mengikutinya agar tidak dipandang hina menurut adat dengan contoh misalnya pihak mempelai perempuan meminta mahar adat 100 juta, maka harga tersebut sudah menjadi harga yang tetap yang harus diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dan tidak ada negosiasi lagi dan tidak dilihat apakah pihak laki-laki mampu atau tidak memenuhinya.

Setelah masuknya Islam di Mandailing pada abad ke-16 mahar tetap menjadi sesuatu yang wajib yang diberikan pihak mempelai laki-laki atas dasar cinta dan kasih sayang kepada calon isterinya dan sejauh mana kesanggupan dan keseriusan yang akan dilihat oleh keluarga mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki dan sebagai tanda penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku bagi setiap masyarakat adat. Akan tetapi dalam prakteknya sekarang mahar adat tidak lagi memberatkan seperti saat sebelum Islam masuk karena dalam hal ini Adat Mandailing harus sejalan dengan hukum Islam mengingat kemampuan seseorang berbeda-beda. Dalam penentuan maharnya pun tidak lagi memberatkan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki meskipun pada awalnya pihak perempuan meminta jumlah harga mahar yang tinggi. Apabila bagi yang mampu dan sanggup memenuhi jumlah mahar yang tinggi itu maka jumlah tersebut sudah menjadi jumlah mahar yang pasti yang harus dipenuhi.

Adapun susunan yang berbicara dalam prosesi adat adalah sebagai berikut: (1) Juru bicara (protokoler) dari suhut. (2) Suhut (yang punya adat acara). (3) Anak boru suhut (menantu yang punya hajat). (4) Pisang raut (ipar dari anak boru). (5) Paralok alok (peserta musyawarah yang turut hadir). (6) Hatobangon (Raja kampung di kampung tersebut). (7) Raja torbing balok (Raja adat dari kampung sebelah). (8) Raja panusunan bulung (Raja di Raja adat). Urutan berbicara, sebagaimana yang saya maksudkan di atas, dihadirkan semua pada acara *makkobar godang* (musyawarah besar), yaitu acara musyawarah pesta perkawinan dan *mangupa* pada pesta perkawinan. Didalam acara penetapan mahar

(makkobar menek) yang diikuti sertakan hanyalah dari pihak perempuan dan laki-laki yang dianggap penting, maka urutan berbicara pada penetapan mahar dalam adat Mandailing yaitu pihak laki-laki dan perempuan.

Penetapan mahar di adat Mandailing sangat berbeda dengan di adat Angkola dan Batak Toba. Di adat Angkola maupun Batak Toba mereka masih mengikuti budaya nenek moyang mereka dan menjaga tradisi adat yang tidak mereka rubah dan bahkan mereka campuri dengan Agama dari zaman nenek moyang mereka sampai sekarang. Misalnya, mahar yang disebutkan pihak perempuan 100 juta maka harga tersebut sudah menjadi harga yang pasti dan tidak dapat dinegosiasi lagi meskipun pihak laki-laki sanggup atau tidaknya untuk memenuhi permintaan mahar tersebut. Sedangkan dalam adat Mandailing kemudahan menjadi hal yang paling penting mengingat pernikahan kedua insan tidak boleh dilamakan dan dipersulit demi bersatunya dua insan karena adat Mandailing sendiri lebih mengenal aturan Agama bahkan Hukum Agama lebih kuat saat ini yang dipegang oleh masyarakat adat Mandailing mengingat mayoritas masyarakat Mandailing bergama Islam. Dengan demikian bukan berarti adat Mandailing tidak memberlakukan lagi tradisi adat yang sudah ada, akan tetapi hukum Agama dan hukum adat harus sejalan dengan menggunakan asas kemudahan dalam pernikahannya sehingga penentuan mahar sendiri ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan pihak laki-laki dalam menyanggupinya meskipun di awal pertemuan pihak perempuan meminta jumlah mahar yang besar. Sedangkan bagi mereka yang mampu dan sanggup untuk memenuhinya jumlah mahar yang

besar itu yang telah disebutkan pihak perempuan di awal pertemuan menjadi jumlah yang tetap yang harus dipenuhi pihak laki-laki.

Dalam penentuan jumlah dan bentuk mahar kebiasaan dalam masyarakat adat Mandailing ditentukan dalam acara mangaririt/marisik-risik. Jumlahnya pun sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, pendidikan dan status sosial. Jumlah dan bentuk mahar yang diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki terkadang dapat memberatkan kepada pihak laki-laki. Jumlah mahar yang berkembang di adat Mandailing cukup besar apalagi apabila perempuan yang akan dilamar mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi yang terkadang banyak pihak yang tidak sanggup memenuhinya. Akan tetapi didalam adat Mandailing biasanya hal tersebut hanyalah harga awal yang ditentukan oleh pihak perempuan dan pada intinya tetap akan disepakati bersama untuk jumlah mahar tersebut dan sampai ditentukan dengan batas kesanggupan pihak laki-laki. Kalau pihak laki-laki yang tergolong kaya dan sanggup untuk memenuhinya maka harga yang ditentukan oleh pihak perempuan menjadi harga yang tetap yang harus dipenuhi.

Penentuan mahar yang cukup besar ini bukan saja bermaksud sebagai mahar dan pelaksanaan atas tradisi yang telah berjalan sejak zaman nenek moyang masyarakat Mandailing akan tetapi mahar adat juga mempunyai tujuan dalam pemberian maharnya yaitu sebagai simbol dalam bersatunya kedua keluarga dan simbol bahwa Mandailing sangat memuliakan wanita. Dalam adat Mandailing wanita sangat dimuliakan karena laki-laki yang sebagai calon suaminya mengambil wanita/calon istrinya dari keluarganya untuk dinikahi dan menjadi

istrinya kemudian bergabung dengan keluarga suaminya dan keluarga si wanita kehilangan anaknya yang akan dan telah menjadi bagian dari keluarga si laki-laki sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak si laki-laki nantinya. Dengan demikian dalam adat Mandailing wanita itu sangat tinggi nilainya. Selain tujuan yang telah disebutkan tadi juga mahar adat mempunyai tujuan lain bahwa selain mahar itu sebagai pemenuhan kebutuhan mempelai perempuan, nantinya mahar adat tersebut akan digunakan sebagai modal dalam melaksanakan rangkaian upacara adat perkawinan/pesta rakyat secara adat dan selebihnya juga akan digunakan bersama antara calon suami dan istri dalam berumah tangga seperti membeli perlengkapan tidur, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Transkrip Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ali Hasibuan

Orang Mandailing diriwayatkan berasal dari Munda yaitu sebuah daerah di India Tengah. Mereka telah berpindah-pindah pada abad ke-6, karena terpukul dengan serangan bangsa Arayan dari Irak yang meluaskan pengaruh mereka. Setelah melintasi Gunung Himalaya mereka menetap sebentar di Mandalay, yaitu ibu negara Burma purba. Besar kemungkinan nama Mandalay itu sendiri datangnya dari perkataan Mandailing yang mengikuti logat Burma. Sekali lagi mereka terpaksa berpindah karena pergolakan suku kaum di Burma yang sering berperang. Kaum Munda telah berjaya menyebrangi laut kecil dan mendirikan sebuah kerajaan di Batang Pane, Portibi di wilayah Sumatera Utara, diduga peristiwa ini terjadi di akhir abad ke-6. Kerajaan Munda Holing di Portibi ini telah menjadi mashur dan meluaskan wilayah taklukannya hingga kesebahagian besar pantai Sumatera dan Tanah Melayu. Kerajaan kedua di Sumatera didirikan di Pidoli Dolok dikenali sebagai kerajaan Mandala Holing artinya kawasan orang-orang Keling. Pada masa itu mereka masih beragama Hindu memuja Dewa Siva. Di abad ke-13, kerajaan Majapahit telah menyerang ke Lamuri, Padang Pariaman dan Mandailing. Sekali lagi kerajaan Mandala Holing ini telah di bumi hanguskan dan hancur. Penduduk yang tidak dapat di tawan telah lari ke hutan dan bercampur-gaul dengan penduduk asli. Lalu terbentuklah Marga Pulungan artinya yang dikutip-kutip. Di abad ke-14 dan ke-15, Marga pulungan telah mendirikan tiga buah Bagas Godang diatas tiga puncak bukit namun kerajaan tersebut bukan lagi sebuah kerajaan yang besar, hanya merupakan kerajaan kampung. Di pertengahan abad ke-14, terdapat legenda tiga anak yang dipertuan Pagar Ruyung

yang bernama Betara Sinomba, Putri Langgoni dan yang bungsunya Betara Gorga Pinayungan yang mendirikan dua buah kerajaan baru. Betana Sinomba telah diusir oleh yang dipertuan dari Pagar Ruyung karena kesalahan bermula dengan adiknya Putri Langgoni. Kedua beradik tersebut beserta pengikutnya telah merantau dan mendirikan kerajaan di Kota Pinang. Yang di Pertuan Kota Pinang inilah yang menurunkan raja-raja ke Kota Raja, Bilah, Kampung Raja dan Jambi. Pendeknya Mandailing ataupun Mandehilang. Beliau juga adalah pengasas/penegak Marga Nasution, artinya orang sakti.

Di dalam tradisi adat mandailing berkembang beberapa kebiasaan sebelum maupun saat prosesi perkawinan, atau berkembang sebagai berikut: (1) *Mangaririt Boru* adalah suatu prosesi dalam kebiasaan masyarakat adat Mandailing sebelum acara perkawinan, dalam istilah orang mandiling yaitu becakap-cakap hal ini guna mendapatkan jawaban persetujuan atau tidaknya perkawinan hingga memusyawarahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, begitu juga dengan penentuan mahar yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah terjadi kesepakatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi berikutnya. Apabila mahar tidak dapat ditentukan oleh kedua belah pihak maka *Harajaon* yang menentukan berapa mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Tidak semua orang dapat dijadikan *Harajaon* karena *Harajaon* merupakan raja adat yang ada di masing-masing wilayah tertentu dan sudah keharusan dalam suatu peminangan *Harajaon* ikut serta dalam proses peminangan tersebut. (2) Pertunangan (*patobang hata boru*). Pertunangan merupakan proses yang dilakukan setelah terjadinya peminangan ataupun

kesepakatan dalam peminangan. Masyarakat adat Mandailing sangat kental dengan adat istiadat yang sudah turun menurun oleh nenek moyang mereka. Pertunangan merupakan prosesi kedua setelah adanya kesepakatan pada saat *marisik-risik* dan pada saat pertunangan tersebut segala kesepakatan yang sudah ditetapkan diserahkan kepada pihak mempelai perempuan. Apabila disaat pertunangan terjadi, pihak mempelai laki-laki tidak memenuhi kesepakatan yang sudah ditetapkan maka pihak mempelai perempuan akan menarik anak perempuan mereka dan membatalkan perkawinan. (3) Penentuan Hari. Penentuan hari merupakan bagian dari prosesi sebelum pernikahan dilaksanakan, apabila kesepakatan sudah terpenuhi maka penentuan hari pernikahan kapan dan dimana suatu pernikahan akan dilaksanakan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ikut andil dalam penentuan hari dan yang ikut andil dalam penentuan hari perkawinan adalah para Harajaon dan pihak keluarga laki-laki dan perempuan. (4) *Markata (markobar boru)*. *Markata (markobar boru, markobar diborngin sebolom si laku on akad nikah na, di son ma markumpul sudena Harajaon hatobangon na martahi on, perkawinan ni bayo pengenten dohot boru pananten)* merupakan malam sebelum dilaksanakannya akad nikah, disinilah berkumpul para *Harajaon* untuk membahas antara calon mempelai laki-laki dan perempuan serta prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah akad nikah dilangsungkan, *Markata* merupakan adat istiadat yang tidak bisa ditinggalkan karena merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam adat perkawinan apabila tidak dilakukan maka perkawinan tersebut tidak diakui secara adat, karena *markata* atau *markobar boru* merupakan rentetan prosesi

terakhir sebelum akad nikah. (5) Akad Nikah. Kebiasaan masyarakat Mandailing saat prosesi akad nikah sama seperti prosesi akad nikah pada umumnya yang disyari'atkan Islam. Pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan dimasjid atau ditempat terjadinya perkawinan. Akad nikah sangat jarang dilakukan di KUA, karena masyarakat setempat sangat kental dengan tradisi sehingga mereka tidak pernah melakukan perkawinan di KUA. Setelah terjadinya akad nikah, maka kedua mempelai duduk berdampingan di bawah tenda perkawinan dan kemudian para tamu undangan diperkenankan untuk mengucapkan selamat dan do'a, dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah yang dibawakan oleh *Harajaon* serta makan bersama dengan pengantin, dan dilanjutkan dengan rangkaian prosesi pernikahan yang sudah ditetapkan oleh panitia pernikahan. (6) Resepsi. Resepsi adalah acara syukuran bagi keluarga untuk masyarakat sekitar, akan banyak tamu undangan dan hiburan yang dilaksanakan. Pada acara resepsi, hampir sama dengan saat akad nikah. Para tamu undangan mengucapkan selamat kepada para pengantin dengan membawa kado atau hadiah untuk mempelai dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat adat Mandailing membawa kado berupa kain khas adat untuk mempelai. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dari keluarga besar mempelai, *Harajaon* serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan rasa syukur dan bahagiannya. Dan untuk acara penutup dari acara resepsi ini adalah acara bebas. Saat acara bebas sanak saudara akan larut dalam irama musik Mandailing dan tari-tarian seperti manortor/tor-tor, mangendeng/endeng-endeng, dangdut dan lain-lain. Acara resepsi merupakan malam puncak dari acara perkawinan mempelai. Acara resepsi banyak diselenggarakan oleh keluarga yang memiliki

harta lebih atau berkecukupan. Acara ini tidak hanya menandakan kebahagiaan bagi mempelai dan juga keluarga akan tetapi, merupakan kebahagiaan juga bagi masyarakat setempat karena pada malam puncak, disitulah berkumpul seluruh masyarakat untuk merayakan malam puncak suatu resepsi.

Masyarakat yang keluar dari ketentusan adat Daliha Na Tolu diwajibkan membayar sanksi adat misalkan karena kawin semarga, apabila sanksi tidak dibayar maka bukan saja yang melakukan yang menerima dampaknya, tapi ikut serta keluarganya.

Transkrip Wawancara Bapak Dzulkarnain Rangkuti

Adat istiadat suku Mandailing diatur dalam Surat Tembaga Holing (Serat Tembaga Kalinga), yang selalu dibacakan dalam upacara-upacara adat. Orang Mandailing mengenal tulisan yang dinamakan aksara Tulak-Tulak, yang merupakan varian dari aksara Proto-Sumatera, yang berasal dari huruf Pallawa, bentuknya tak berbeda dengan aksara Minangkabau, aksara Rencong dari Aceh, aksara Sunda Kuna, dan aksara Nusantara lainnya. Meskipun suku Mandailing mempunyai aksara yang dinamakan urup tulak-tulak dan dipergunakan untuk menulis kitab-kitab kuno yang disebut pustaha (pustaka). Namun sangat sulit untuk menemukan catatan sejarah mengenai Mandailing sebelum abad ke-19. Umumnya pustaka-pustaka ini berisi catatan pengobatan tradisional, ilmu-ilmu ghoib, ramalan-ramalan tentang waktu yang baik dan buruk, serta ramalan mimpi.

Suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan, baik patrilineal maupun matrilineal. Dalam sistem patrilineal, orang Mandailing mengenal marga. Di Mandailing hanya dikenal belasan marga saja berbeda dengan suku Batak lainnya, yang mengenal hampir 500 marga. Seperti halnya di Karo, Nias, Gayo, Alas. Marga-marga di Mandailing pada umumnya tak mempunyai keterkaitan, kekerabatan dengan Batak. Marga-marga di Mandailing, antara lain: Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan (Nasibuan), Rambe, Dalimunthe, Rangkuti, Tanjung, Mardia, Daulay (Daulae), Matondang, Hutasuhut. Marga-marga Mandailing menurut hatobangon (orang yang dituakan), di Mandailing Julu dan Pakantan, seperti berikut: Lubis yang terbagi pada Lubis Huta Nopan dan Singa Soro, Nasution, Parinduri, Batubara, Matondang, Daulay,

Nai Monte, Hasibuan, Pulungan. Adapun marga-marga di Mandailing Godang adalah: Nasution, yang terbagi pada Nasution Panyabungan, Tambangan, Borotan, Lancat, Jior, Tonga, Dolok, Maga, Pidoli. Lubis, Hasibuan, Harahap, Batubara, Matondang (keturunan Hasibuan), Rangkuti, Mardia, Parinduri, Batu Na Bolon, Pulungan, Rambe, Mangintir, Nai Monte, Panggabean, Tangga Abeng, dan Margara. (Rangkuti, Mardia, dan Parinduri asalnya satu marga). Di Angkola dan Sipirok terdapat marga-marga Pulungan, Baumi, Harahap, Siregar, Dalimunthe, Daulay. Juga terdapat marga-marga Harahap, Siregar, Hasibuan, Daulay, Dalimunthe, Pulungan, Nasution, dan Lubis di Padang Lawas. Menurut Basyral Hamidy Harahap dalam buku berjudul Horja, marga-marga di Mandailing antara lain Babiati, Dabuar, Baumi, Dalimunthe, Dasopang, Daulay, Dongoran, Harahap, Hasibuan, Hutasuhat, Lubis, Nasution, Pane, Parinduri, Pasaribu, Payung, Pohan, Pulungan, Rambe, Rangkuti, Ritonga, Sagala, Simbolon, Siregar, Tanjung.

Sebelum acara adat dimulai, maka ada perencanaan kegiatan yang namanya horja (pekerjaan) yang berhubungan dengan hal urusan adat diperlukan suatu kata sepakat. Hasil kesepakatan/musyawarah adat tersebut namanya *domuni tahi*. Ada tiga tingkatan *horja* yang juga menentukan siapa-siapa yang harus hadir di peradatan tersebut, yaitu: (1) Horja dengan landasannya memotong ayam. Horja ini yang diundang hanya kaum kerabat terdekatnya dan undangannya cukup dengan hanya pemberitahuan biasa saja, (2) Horja dengan landasannya memotong kambing. Horja ini biasanya disebut dalam peradatan, yaitu: pangkupangi. Yang diundang selain dari daliha na tolu, juga ikut serta namora natoras di huta tersebut Raja Pamusuk, (3) Horja dengan landasannya memotong kerbau. Horja ini dimana

unsur-unsur (lembaga-lembaga) adat diundang, baik yang ada di huta tersebut maupun yang ada diluar huta, seperti Raja-Raja Torbing Balok, Raja-Raja dari desa Nawalu, dan Raja Panusunan. Makna horja tersebut menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, melaksanakan, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan seluruh nilai-nilai leluhur yang sudah berumur ratusan tahun, rasa kebersamaan, rasa tolog menolong, rasa kegotong royongan, saling menghargai, saling menghorati, dan juga memberi manfaat kepada masyarakat.

Menurut masyarakat adat Mandailing mahar adalah proses wajib bagi laki-laki kepada mempelai perempuan, sesuai dengan permintaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut bapak Dzulkarnain Rangkuti selaku kepala adat (*Harajaon*) di Kecamatan Medan Johor, mahar merupakan permintaan dari pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki sebagai tanda rasa cinta dan bentuk kasih sayang kepada calon mempelai perempuan sebagai wujud kesanggupan sejauh mana silaki-laki mencintai pasangannya dengan memenuhi jumlah mahar yang akan ditentukan oleh pihak mempelai perempuan dan mengangkat derajat seorang wanita yang akan dinikahnya sebagai tanda keseriusan dari si laki-laki.

Kedudukan mahar dalam hukum adat Mandailing merupakan suatu kewajiban yang memang sudah mendarah daging dalam masyarakat adat dan harus ada dalam suatu perkawinan adat Mandailing, mahar mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dari segi pemberiannya, kedudukan mahar bagi seorang gadis merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahi dengan memenuhi beberapa

ketentuan atau syarat-syarat yang akan dibawa dalam setiap pertemuan kedua pihak mempelai dalam perkawinan adat Mandailing dan juga menentukan jumlah mahar yang sesuai dengan kesepakatan berapa yang akan dibayar dan biasanya jumlah mahar yang ditentukan tidak semurah jumlah mahar pada janda atau sudah bercerai. Akan tetapi kedudukan mahar bagi seorang janda atau sudah tidak gadis lagi sudah tidak diwajibkan lagi dan jumlah maharnya pun sesuai dengan kesanggupan dan kerelaan silaki-laki saja dalam memberinya.

Transkrip Wawancara Dengan Bapak Ramly Harahap

Pemberian *sinamot* (mahar) yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat adat Mandailing sebenarnya merupakan keseluruhan dari rangkaian acara adat dalam perkawinan, dimulai dari pemberian hadiah (*marriage portion*) dari kedua belah pihak calon pengantin, kemudian membahas harga mahar, kesepakatan harga mahar, hingga penentuan waktu pengantaran mahar kepada calon istri. Semua itu dalam adat Mandailing disebut sebagai *sinamot* atau *marhata sinamot*. Antara lamaran, membahas harga mahar, sepekatan harga mahar, hingga penentuan pengantaran masing-masing memiliki waktunya sendiri dan tidak dilakukan dalam satu waktu. Selanjutnya dalam praktiknya di lapangan sosial masyarakat, bahwa pemberian *sinamot* dalam adat perkawinan dapat diberikan dahulu pada saat prosesi peminangan. Pada saat inilah terjadi suatu musyawarah antara masing-masing juru bicara adat, kepala adat, dan keluarga calon suami dan istri sebagai suatu kompromi tentang penentuan kadar dan jumlah serta bentuk *sinamot* dikuasakan penuh kepada pihak calon istri. Dalam hal ini ketentuan *sinamot* di ukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan ditambah dengan jabatan dalam pekerjaannya (kalau misalkan bekerja). Hal ini yang membuat harga *sinamot* dalam adat Mandailing sangat mahal sebab semuanya nantinya dipergunakan bersama dalam rumah tangga seperti lemari, kasur, peralatan dapur, dan peralatan rumah tangga lainnya, serta pakaian si istri. Dalam adat Mandailing semua itu akan dianggap merupakan mahar kepada calon istri. Akan tetapi kesemua itu akan tetap melalui kata sepakat antara kedua belah pihak kalau kalau

secara kemampuan sangat memberatkan dan menjadi jumlah harga yang pasti bagi mereka yang mampu dan sanggup memenuhinya.

Orang Mandailing diriwayatkan berasal dari Munda yaitu sebuah daerah di India Tengah. Mereka telah berpindah-pindah pada abad ke-6, karena terpukul dengan serangan bangsa Arayan dari Irak yang meluaskan pengaruh mereka. Setelah melintasi Gunung Himalaya mereka menetap sebentar di Mandalay, yaitu ibu negara Burma purba. Besar kemungkinan nama Mandalay itu sendiri datangnya dari perkataan Mandailing yang mengikuti logat Burma. Sekali lagi mereka terpaksa berpindah karena pergolakan suku kaum di Burma yang sering berperang. Kaum Munda telah berjaya menyebrangi laut kecil dan mendirikan sebuah kerajaan di Batang Pane, Portibi di wilayah Sumatera Utara, diduga peristiwa ini terjadi di akhir abad ke-6. Kerajaan Munda Holing di Portibi ini telah menjadi mashur dan meluaskan wilayah taklukannya hingga kesebahagian besar pantai Sumatera dan Tanah Melayu. Kerajaan kedua di Sumatera didirikan di Pidoli Dolok dikenali sebagai kerajaan Mandala Holing artinya kawasan orang-orang Keling. Pada masa itu mereka masih beragama Hindu memuja Dewa Siva. Di abad ke-13, kerajaan Majapahit telah menyerang ke Lamuri, Padang Pariaman dan Mandailing. Sekali lagi kerajaan Mandala Holing ini telah di bumi hanguskan dan hancur. Penduduk yang tidak dapat di tawan telah lari ke hutan dan bercampur-gaul dengan penduduk asli. Lalu terbentuklah Marga Pulungan artinya yang dikutip-kutip. Di abad ke-14 dan ke-15, Marga pulungan telah mendirikan tiga buah Bagas Godang diatas tiga puncak bukit namun kerajaan tersebut bukan lagi sebuah kerajaan yang besar, hanya merupakan kerajaan kampung. Di

pertengahan abad ke-14, terdapat legenda tiga anak yang dipertuan Pagar Ruyung yang bernama Betara Sinomba, Putri Langgoni dan yang bungsunya Betara Gorga Pinayungan yang mendirikan dua buah kerajaan baru. Betana Sinomba telah diusir oleh yang dipertuan dari Pagar Ruyung karena kesalahan bermula dengan adiknya Putri Langgoni. Kedua beradik tersebut beserta pengikutnya telah merantau dan mendirikan kerajaan di Kota Pinang. Yang di Pertuan Kota Pinang inilah yang menurunkan raja-raja ke Kota Raja, Bilah, Kampung Raja dan Jambi. Pendeknya Mandailing ataupun Mandehilang. Beliau juga adalah pengasas/penegak Marga Nasution, artinya orang sakti.

Penentuan mahar secara adat (*sinamot*) merupakan suatu tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu yang pada awal mulanya berasal dari adat Toba, adat tersebut dibawa ketika masyarakat Toba keluar dari daerah mereka yang awal mulanya beragama Kristen, sampai akhirnya mereka datang ke suatu desa dan mereka kemudian membangun sebuah desa, pemukiman pertama atau biasa disebut juga sebagai masyarakat yang pertama kali membuka desa merupakan raja yang ada di desa tersebut sampai turun menurun dan otomatis secara adat mereka menjadi penerus raja. Para raja (*Harajaon*) tersebut mempunyai peranan penting dalam penentuan mahar adat, sebelum peminangan terjadi *Harajaon* berkumpul dengan pihak laki-laki dan perempuan dalam menentukan mahar yang ditetapkan kepada mempelai laki-laki dan kemudian setelah adanya kesepakatan maka terjadilah peminangan. Sejarah tentang mahar dalam adat Mandailing sendiri merupakan suatu tradisi yang telah dituliskan ke dalam perjanjian yang disebut surat *tumbaga holing/serat tembaga kalingga* yang

selalu dibacakan dalam upacara-upacara adat, yang kemudian sampai sekarang masih diikuti dan dipercayai masyarakat adat sendiri.

Penetapan mahar adalah salah satu acara yang ada di dalam *marisik-risik* yang merupakan bagian dari pelaksanaan adat Mandailing pada umumnya. Dalam pelaksanaan penetapan mahar di adat Mandailing dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan. Dalam menentukan mahar seorang mempelai wanita tidak diikuti serta dalam penentuan maharnya, akan tetapi *Harajaon* serta pihak mempelai perempuan yang menentukan berapa besar mahar yang akan diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut: setelah ditentukan hari penetapan mahar, sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan, maka utusan dari pihak perempuan datang ke rumah calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan tentang hari penetapan mahar tersebut. Setelah kaum kerabat dari calon mempelai perempuan telah berkumpul (Ayah, Ibu, Paman, Kakek, Nenek, Tulang, Bibi, dll) pada hari yang ditentukan, maka pihak laki-laki pun (Ayah, Ibu, Paman, Kakek, Nenek, Tulang, Bibi, dll) datang ke rumah calon mempelai perempuan. Sesampainya pihak calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan, maka salah seorang dari pihak perempuan mempersilahkan duduk di sebelah kanan rumah, setelah itu barulah acara dimulai. Adapun agenda acara sebagai berikut: (1) Pembukaan (salah seorang dari pihak perempuan). (2) Pendapat masing-masing terhadap kadar ukuran mahar yang ada di bebaskan kepada calon suami. (3) Cara pembayaran mahar. (4) Batas akhir penyerahan mahar oleh calon suami. (5) Waktu pelaksanaan akad nikah. (6)

Kesimpulan (hasil musyawarah) yang akan dibacakan oleh pembawa acara (protokol). Bila diperlukan.

Lampiran

Curriculum Vitae



Nama : Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis

Tempat/Tanggal lahir : Medan, 06 Juni 1995

Alamat : Jalan Karya Kasih, Gg. Kasih Dalam No. 26,
Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor,
Medan, Sumatera Utara.

Ayah : Abidin Azhar Lubis

Ibu : Tun Atikah

No. Hp : 0812-8120-4388

Email : ahmadmudzakkir8@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- ✓ SD Negeri 060929 Medan Johor (2001-2006)
- ✓ PP. Ar-Raudhatul Hasanah Medan (2006-2008)
- ✓ MTs Negeri Ex-PGA Proyek UNIVA Medan (2008-2010)
- ✓ MAN 1 Medan (2010-2013)
- ✓ S1 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2018)

Prestasi :

- ✓ Juara III PORKOT (Pekan Olahraga Kota) Medan cabang olahraga Tarung Derajat (2011)
- ✓ Juara I PORKOT (Pekan Olahraga Kota) Medan (2012)